BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan dalam pelayanan publik, apabila kedua hal tersebut tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Fungsi, peranan, serta masalah dapat ditimbulkan oleh sarana transportasi yang semakin banyak seiring dengan kemajuan teknologi dan pertambahan penduduk. Peranan transportasi semakin penting sejalan dengan tingkat kemajuan ekonomi dan kemakmuran negara. Sehingga alat transportasi berpengaruh terhadap peningkatan kemajuan ekonomi dan pembangunan suatu negara.

Pembangunan mempunyai makna yang beragam dan ruang lingkup yang luas maupun sempit serta mampu membawa sebuah perubahan. Proses perubahan mempunyai pengaruh pada sistem-sistem sosial (nilai, pola perilaku maupun pola komunikasi) dalam masyarakat dimana sistem-sistem terbangun dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang dinamis. Keadaan geografis dan tingkat penghasilan di masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang memiliki makna sosial tertentu. Selain itu perkembangan industri yang menyebar di masyarakat juga memiliki konstribusi dalam membentuk perilaku sosial setiap individu. Jika perkembangan industri semakin cepat maka perilaku individu dalam masyarakat juga mengalami perubahan. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan gaya hidup yang dilakukan oleh setiap individu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut William L. Collie, ”jumlah besar penduduk desa yang urbanisasi ke kota-kota semakin meyakinkan bahwa kawasan perkotaan itu berpengaruh penting pada desa-desa itu.”[1] Sehingga dibutuhkan akses yang mudah agar segala kebutuhan warga masyarakat dapat terpenuhi. Karena pilihan masyarakat bervariasi dengan bergantung pada cara penyusunan berbagai masalah untuk diselesaikan. Sehingga masyarakat harus mampu bersikap terbuka terhadap masalah-masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat terbuka mencerminkan hubungan antara negara dan masyarakat yang memiliki hubungan penting antara satu sama lain.

Menurut George Soros, ”prinsip dasarnya adalah masyarakat dan negara itu tidak identik, negara harus melayani masyarakat, bukan untuk menguasainya.”[2] Inti gagasan George Soros adalah masyarakat dan negara memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Sehingga negara harus mampu melayani segala kebutuhan masyarakat, bukan untuk menguasai masyarakat yang dilatarbelakangi oleh kepentingan beberapa pihak. Karena kepentingan beberapa pihak mampu membawa perubahan dalam negara.

Negara tidak mempunyai wewenang untuk mengambil segala keputusan, karena masyarakat juga harus disertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Berbagai gerakan pembangunan desa yang

---

[1] William L. Collier, et.al, *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Desa di Jawa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), 167.

[2] George Soros, *Krisis Kapitalisme Global (Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya)* (Yogyakarta: Qalam, 2002), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melibatkan unit sosial dan kelembagaan sosial masyarakat pedesaan bertumpu pada upaya memperjuangkan perbaikan kehidupan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan mampu menciptakan hubungan saling terkait antara rakyat dan pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Melalui pembangunan diharapkan dapat tersalurkan berbagai program secara cepat dan langsung kepada sasaran. Sebelum melakukan proses pembangunan, panitia yang terlibat harus membuat anggaran dana yang dibutuhkan. Salah satunya adalah anggaran dana untuk ganti rugi lahan yang harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika terjadi ketidaksesuaian maka masyarakat mempunyai wewenang untuk melakukan protes kepada panitia pelaksana pembangunan. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menimbulkan permasalahan.

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, ”kesejahteraan negara yang diusahakan pemerintah telah banyak memberikan manfaat bagi banyak orang, justru meningkatkan konflik.”[3] Maksud dari gagasan tersebut adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui proses pembangunan untuk kesejahteraan negara selain memberikan banyak manfaat, juga mampu menciptakan berbagai permasalahan. Hal ini disebabkan oleh keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas.

Salah satu pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan Jalan Tol yang bertujuan untuk mempermudah segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Namun pembangunan Jalan Tol juga

[3] Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 1986), 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Pembangunan berdampak positif bagi masyarakat yang menerima pembangunan dengan terbuka, hal ini dikarenakan mampu mengurangi kemacetan. Dan berdampak negatif bagi masyarakat yang tertutup dengan adanya pembangunan, hal ini dikarenakan kekhawatiran adanya tindak kejahatan.

Proses pembangunan Jalan Tol cenderung menggunakan lahan yang mempunyai jarak tempuh strategis bagi pengguna jalur. Jadi secara tidak langsung Jalan Tol dibangun dengan tujuan sebagai jalur alternatif dalam mengurangi tingkat kemacetan. Dalam proses pembangunan Jalan Tol biasanya menggunakan lahan milik masyarakat desa. Hal ini dikarenakan lahan-lahan milik masyarakat mempunyai jarak tempuh yang strategis. Untuk mendapatkan lahan tersebut perlu dibentuk panitia pengadaan tanah untuk melakukan penaksiran harga ganti rugi setiap lahan.

Soedharyo Soimin menjelaskan tentang tugas pokok panitia penaksiran ganti rugi, sebagai berikut :

a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan bangunan-bangunan.
b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan,tanaman.
c. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak.
d. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa pertimbangannya.
e. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah, bangunan, tanaman tersebut.[4]

[4] Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa tugas pokok tersebut dapat diketahui bahwa tugas pertama panitia penaksiran ganti rugi adalah melihat kondisi tanah serta bangunan dan tanaman yang berdiri di atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan. Kemudian melakukan musyawarah dengan pemilik lahan dan melakukan penetapan harga gantu rugi. Jika sudah mencapai kesepakatan ganti dilanjutkan dengan berita acara pembebasan tanah dan panitia penaksiran ganti rugi hadir dalam pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi lahan masyarakat. Sehingga proses pembangunan Jalan Tol dapat berjalan dengan baik.

Pembangunan Jalan Tol tersebut terkait dengan proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto yang menggunakan lahan masyarakat Desa Tampingmojo. Proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto merupakan proyek Tol Trans Jawa (Jakarta-Surabaya) berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Pembangunan Jalan Tol ini diharapkan bisa menjadi salah satu Tol terbaik di Indonesia. Yakni dengan desain gerbang dan kantornya dibuat dengan memperhatikan budaya setempat, namun dalam nuansa modern. Sirip-sirip pada atap menyerupai susunan batu pada candi-candi di Jawa Timur.

Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto melibatkan beberapa pihak seperti: masyarakat pemilik tanah yang terkena ruas Jalan Tol, Kepala Desa Tampingmojo dan Perangkat Desa Tampingmojo, Badan Perwakilan Desa (BPD) Tampingmojo, PT Marga Hanura Interensinc yang sekarang menjadi PT Marga Harjaya Infrastruktur, Tim Pengadaan Tanah (TPT), P2T

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Panitia Pengadaan Tanah) Jombang, Pengadilan Negeri Jombang, Badan Pertanahan Nasional, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Mojokerto, serta berbagai pihak lainnya. Selain itu proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto juga menimbulkan berbagai permasalahan yaitu masih terdapat beberapa warga yang belum mengizinkan lahannya digunakan untuk pembangunan.

Hal ini disebabkan oleh pemberian uang ganti rugi lahan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginginkan harga yang tinggi berdasarkan luas lahan yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan yakni Tim Pengadaan Tanah (TPT) telah memberikan penaksiran harga tanah sesuai luas lahan masyarakat. Dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Kertosono-Mojokerto telah memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati dan berdasarkan luas lahan yang dimiliki oleh warga.

Pemberian uang ganti rugi tersebut sesuai dengan ketetapan kementrian keuangan, yakni sesuai anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah. Setiap proses pembangunan pasti menimbulkan berbagai permasalahan dalam pemberian uang ganti rugi. Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto berusaha mendekati masyarakat yang bermasalah agar bersedia menerima uang ganti rugi dan melepaskan lahannya. Apabila masyarakat tetap menolak uang ganti rugi yang telah ditetapkan maka akan dilakukan eksekusi paksa pada lahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan tersebut juga terjadi di Desa Tampingmojo yaitu terdapat empat warga yang belum bersedia menerima uang ganti rugi lahan. Hal ini dikarenakan uang ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga empat warga tersebut belum bersedia mengambil uang ganti rugi lahan yang sudah disediakan. Untuk memperoleh perubahan uang ganti rugi lahan, masyarakat harus melakukan beberapa prosedur yang telah diputuskan oleh pemerintah. Apabila tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan maka harga lahan tidak akan mengalami perubahan.

Menurut Surat Keputusan Bupati Jombang, ”Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, maka pemilik tanah yang keberatan terhadap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Jombang tentang bentuk dana atau besaran ganti rugi perlu diberikan penyelesaian oleh Bupati.”[5] Sehingga permasalahan beberapa warga yang belum bersedia menerima ganti rugi lahan ditangani oleh Bupati Jombang. Jadi masyarakat harus mengajukan permohonan untuk kenaikan UGR kepada Bupati Jombang. Apabila Bupati sepakat dengan permohonan yang diajukan oleh masyarakat, maka dapat dilanjutkan ke tingkat provinsi. Yakni kenaikan UGR tersebut memperoleh persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.

Lahan yang dimiliki oleh warga tersebut tetap dieksekusi untuk proses pembangunan, meskipun beberapa warga tersebut tetap tidak ingin mengambil uang ganti rugi yang telah disediakan. Proses pembangunan Jalan

[5] Bupati Jombang, Surat Keputusan Bupati Jombang, Nomor : 188.4.45/10/415.10.10/2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tol Kertosono-Mojokerto tetap harus berjalan meskipun terdapat berbagai kendala di masyarakat. Hal ini dikarenakan proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto merupakan proyek Tol Trans Jawa (Jakarta-Surabaya) yang direncanakan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pelaksanaan program pembangunan.

Sehingga program pembangunan di Indonesia, khususnya pulau Jawa dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Pembangunan tidak hanya menguntungkan pemerintah (pihak yang terlibat dalam pembangunan) tetapi untuk semua warga Indonesia. Karena tujuan adanya pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran bersama, bukan beberapa pihak saja. Setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan bagian dari proses pembangunan. Sehingga pembangunan akan tetap berjalan meskipun terdapat berbagai gejolak permasalahan dalam masyarakat.

Dari paparan tentang Problematika Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto maka menciptakan berbagai rumusan masalah untuk diteliti dan diperoleh kebenarannya. Untuk itu sehubungan dengan pertanyaan pada rumusan masalah, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul :

PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-MOJOKERTO (Studi tentang Ganti Rugi Lahan Masyarakat di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana problematika yang terjadi akibat sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui problematika yang terjadi akibat sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi disiplin ilmu sosiologi. Serta dapat memberikan konstribusi untuk peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian di masyarakat ataupun lembaga masyarakat.

2. Praksis :

   Memberi wawasan atau pengetahuan dari penulis mengenai hal-hal yang terkait dengan ganti rugi lahan untuk pembangunan (kepentingan umum). Pada sisi lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi di bidang pembangunan khususnya tentang sistem ganti rugi lahan masyarakat pemilik tanah yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol. Memberikan wawasan kepada masyarakat agar mengetahui program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Serta prosedur yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan ganti rugi lahan untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto, khususnya bagi warga Desa Tampingmojo Dusun Tampingan. Diharapkan dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat, warga kota Jombang dapat memberikan kontrol sosial bagi pemerintah Kabupaten Jombang. Selain itu juga memberikan gambaran tentang hal yang diinginkan masyarakat dari proses pemberian ganti rugi lahan tersebut, agar tidak terjadi salah pengertian dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Konseptual

Dalam penelitian tentang "**PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-MOJOKERTO** (Studi tentang Ganti Rugi Lahan Masyarakat di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)", diperlukan adanya sebuah definisi operasional untuk menghindari ketidakjelasan arah penelitian, adapun definisi operasional penelitian diatas meliputi :

1. Problematika

   Menurut Depdikbud, "problematika adalah hal yang belum dapat dipecahkan atau yang masih menimbulkan permasalahan.[6] Problematika dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto yang menimbulkan permasalahan antara pihak terkait pembangunan Jalan Tol dengan masyarakat, terutama pada masyarakat Tampingan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

2. Pembangunan Jalan Tol

   Jalan Tol merupakan jalan bebas hambatan yang di bangun dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Pembangunan Jalan Tol dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-

[6] Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojokerto antara panitia pelaksana pembangunan dengan masyarakat Tampingmojo yang masih menemui kendala. Pembangunan Jalan Tol yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan justru terkendala oleh masyarakat sekitar. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto.

3. Ganti rugi

Ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Ganti rugi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto dan masih menimbulkan permasalahan. Masalah tersebut ditimbulkan oleh masyarakat yang belum bersedia melepaskan lahannya untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto.

4. Lahan Masyarakat

Lahan Masyarakat adalah tanah terbuka; tanah garapan yang berada di masyarakat. Lahan masyarakat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Lahan tersebut diperoleh dengan cara membayar uang ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan, meskipun terdapat permasalahan dalam pembangunan tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto.

Berdasarkan definisi operasional tersebut penelitian dengan judul "**PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-MOJOKERTO** (Studi tentang Ganti Rugi Lahan Masyarakat di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)" menjelaskan tentang konsep yang digunakan dalam penelitian. Sehingga memperoleh kesamaan pemahaman bagi pembaca dan terhindar dari perbedaan pemahaman yang mampu membuat definisi konseptual penelitian berubah makna.

F. Telaah Pustaka

Dari penelitian terdahulu didapatkan hasil penelitian dimana masing-masing peneliti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam penelitiannya. Diantaranya sebagai berikut :

1. Citraningtyas Wahyu Adhie

Citraningtyas Wahyu Adhie dengan judul penelitian "**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR KOTA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**", penelitian tersebut dilaksanakan di Wonogiri pada tahun 2010.[7]

Penelitian tersebut menjelaskan tentang prosedur pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota (JLK) Kabupaten Wonogiri sesuai dengan

[7] Citraningtyas Wahyu Adhie, "*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri*" (SH Skrip., Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 j.o Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 dan kesepakatan mengenai ganti rugi antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pemilik tanah.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, menemukan hukum *in concreto* sesuai atau tidaknya prosedur pengadaan tanah dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat panitia pengadaan tanah Kabupaten Wonogiri untuk klarifikasi atas data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian Citraningtyas Wahyu Adhie adalah :

a. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di antaranya adalah pembuatan jalan umum. Salah satunya adalah Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri. Pembangunan Jalan Lingkar Kota ini membutuhkan tanah milik masyarakat dalam pelaksanaannya. Maka dari itu pelaksanaan pengadaan tanah harus sesuai dengan peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku agar tidak merugikan masyarakat. Dalam tahapan pelaksanaannya, pembangunan Jalan Lingkar Kota di Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan substansi peraturan perundangan pengadaan tanah yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaanya. Bagian yang tidak sesuai yaitu keanggotaan tim penilai harga tanah yang terdiri dari pihak-pihak instansi yang memerlukan tanah. Hal ini dapat menimbulkan rendahnya tingkat ganti rugi karena harga tanah ditentukan oleh instansi yang memerlukan tanah. Selain itu jangka waktu penempelan pengumuman mengenai penetapan bentuk dan jumlah ganti rugi yang terlalu lama yaitu 30 (tiga puluh) hari tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang hanya menyediakan waktu 7 (tujuh) hari.

b. Proses berlangsungnya musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah yaitu Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara langsung dan dapat mencapai kesepakatan dalam penentuan ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman, atau benda lain yang ada di atasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesepakatan ini kemudian tertuang dalam berita acara masing-masing wilayah pengadaan tanah. Bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah adalah berupa uang, meskipun di dalam ketentuan perundang-undangan dimungkinkan dalam bentuk lain.

2. Dwi Erga Seprizal

Dwi Erga Seprizal dengan judul penelitian "**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN GANTI RUGINYA TERKAIT DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR KOTA MALANG** (Studi di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur)", penelitian tersebut dilaksanakan di Malang pada tahun 2007.[8]

Penelitian tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pengadaan tanah dan ganti ruginya untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur kota Malang. Permasalahan yang diangkat adalah proses pelaksanaan pengadaan tanah, hambatan yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah dan upaya-upaya yang telah dan dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi hambatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Metode yang digunakan dalam pengambilan sample

[8] Dwi Erga Seprizal, *"Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Ganti Ruginya Terkait dengan Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kota Malang (Studi Di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur)"* (SH Skrip., Universitas Brawijaya Malang, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah *purposive sampling.* Data-data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dianalisa dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian Dwi Erga Seprizal adalah :

a. Dari prosedur pengadaan tanah yang berlangsung di Desa Ampeldento terdapat satu masalah penting dan mendasar tentang pengadaan tanah, yaitu tidak dibentuknya Panitia Pengadaan tanah oleh Bupati Kabupaten Malang untuk menangani Proses pengadaan tanah. Tidak dibentuknya panitia membuat bingung bidang hukum Kabupaten Malang, semua syarat yang dibutuhkan dalam pembentukan Panitia Pengadaan Tanah sudah terpenuhi, tetapi Bupati belum juga mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur. Hal ini mengakibatkan upaya yang dilakukan oleh Camat Pakis dan Kepala Desa Ampeldento tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak adanya Panitia Pengadaan Tanah maka tidak jelas pula pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait, sehingga timbul kesan bahwa yang menjadi tulang punggung proses pengadaan tanah adalah Camat Pakis dan Kepala Desa Ampeldento.
b. Hambatan utama yang akan muncul dari proses pengadaan tanah adalah perbedaaan penghitungan ganti rugi yang dilakukan pemerintah (Kecamatan Pakis dan Desa Ampeldento) dan yang diharapkan oleh warga desa pemilik hak atas tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi hambatan proses pengadaan tanah adalah mengoptimalkan sosialisasi pentingnya pembangunan Jalan Lingkar Timur bagi perkembangan perekonomian dan kelancaran mobilisasi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Malang. Upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi hambatan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur adalah sesegera mungkin membentuk Panitia Pengadaan Tanah. Mengingat pentingnya peran panitia dalam melakukan proses musyawarah dengan pemilik hak atas tanah.

3. Fitria Dwi Ariesta

Fitria Dwi Ariesta dengan judul penelitian "**MEMBANGUN DESA MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) DI KECAMATAN MANDIRAJA, KABUPATEN BANJARNEGARA**, penelitian tersebut dilaksanakan di Banjarnegara pada tahun 2014.[9]

Penelitian tersebut menjelaskan tentang membangun desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Permasalahan yang diangkat adalah pengaruh PPIP dalam meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran program yang diharapkan dapat

[9] Fitria Dwi Ariesta, "*Membangun Desa Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara"* (SE Skrip., Universitas Diponegoro Semarang, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis persepsi masyarakat sebelum dan setelah PPIP serta analisis peran *stakeholders* digunakan analisis penilaian mulai dari 1 sampai dengan 10. Intensitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PPIP di Kecamatan Mandiraja digunakan analisis deskriptif. *Snowballing sampling* diterapkan untuk memilih 100 responden masyarakat desa dan 13 responden *key-person*.

Hasil dari penelitian Fitria Dwi Ariesta adalah :

a. Pengelolaan PPIP di Kabupaten Banjarnegara, masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan kegiatan. Selain itu masyarakat mendapat pendampingan dari fasilitator, dukungan dari pemerintah dan juga adanya kelembagaan PPIP berupa organisasi pengelolaan di tingkat desa dan kecamatan yang anggotanya berasal dari masyarakat serta mendapat pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat sebagai pelaku utama PPIP dan penerima manfaat hasil pembangunan. Salah satunya pengelolaan PPIP di Kecamatan Mandiraja sebagai program pembangunan partisipatif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendukung proses pengurangan ketimpangan wilayah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterpurukan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Mandiraja.

b. Tingkat partisipasi dalam curah waktu, swadaya, sosial, dan moral masyarakat yang tinggi. Penelitian ini menguraikan strategi untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan produktivitas para responden serta menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen pengelolaan PPIP.

4. Andi Ripai

Andi Ripai dengan judul penelitian "**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BONTOMATENE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**", penelitian tersebut dilaksanakan di Kepulauan Selayar pada tahun 2013.[10]

Penelitian tersebut menjelaskan tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara survei, wawancara, observasi, kuesioner.

[10] Andi Ripai, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar"* (SSos Skrip., Universitas Hasanuddin Makasar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian Andi Ripai adalah :

a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi :

1) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berbentuk ide/ pikiran yang sama jumlah skor yang dicapai sesuai dengan penilaian responden yaitu 2,44 berati tergolong sedang.
2) Partisipasi dalam pembangunan yang berbentuk uang (dana) tergolong dalam kategori sedang dengan skor yang dicapai 2,94.
3) Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang (materi) berada dalam kategori rendah dengan skor yang dicapai 1,66.
4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang disumbangkan secara fisik (tenaga) yang mana skor yang dicapai 3,07 berarti tergolong tinggi.

Berdasarkan skor yang dicapai masing-masing bentuk partisipasi tersebut, maka secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene adalah tergolong sedang dengan jumlah skor rata-rata mencapai 2,53.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene yaitu :

1) Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, misalnya tingkat pendidikan masyarakat, penghasilan/ pendapatan yang paling penting adalah adanya kesadaran diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat secara pribadi yang dilandaskan pada agama yang dianutnya.

2) Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan disekitar diluar diri masyarakat yang meliputi kepemimpinan pemerintah (Kepala Kecamatan beserta aparatnya) dan peralatan.

5. Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Naping

Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Naping dengan judul penelitian "**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA** (Studi Kasus : Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba)", penelitian tersebut dilaksanakan di Bulukumba.[11]

Penelitian tersebut menjelaskan tentang partisipasi masyarakat di Desa Bialo pada proses pembangunan infrastruktur desa dan aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan unit analisis informan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen.

Beberapa penelitian tersebut berfungsi sebagai pembanding penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan paparan diatas penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan

[11] Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka, "*Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus : Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba)"*, http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/20896e948e4eafaba6c303ccdf0d8280.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sehingga penelitian dari masing-masing peneliti mempunyai perbedaan dan bukan bentuk plagiasi.

Hasil dari penelitian Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Naping adalah :

a. Partisipasi masyarakat di Desa Bialo pada proses pembangunan infrastruktur desa yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan berupa kehadiran dan ide atau pemikiran. Pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, material dan dana. Sementara pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi hanya berupa sumbangan tenaga.
b. Aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan dalam hal ini tipe pertanian memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat pada semua tahap, sementara tingkat pendidikan hanya berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada tahap persiapan sedangkan homogenitas masyarakat tidak mempunyai hubungan terhadap partisipasi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Juliansyah Noor menjelaskan gagasan Denzin dan Licoln mengenai pendekatan kualitatif sebagai berikut:

> Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.[12]

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *grounded theory*. Menurut gagasan Denzin dan Licoln, ”tujuan pendekatan ini adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu.”[13] Maksud dari gagasan tersebut adalah situasi dimana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respons terhadap suatu peristiwa. Pendekatan *grounded theory* adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari.

Jika dikaitkan dengan problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto, penelitian kualitatif bersifat induktif. Maksudnya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Kemudian data dihimpun dengan

[12] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 33-34.
[13] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam (interview), serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Dengan jenis penelitian tersebut peneliti berusaha menggali informasi terkait problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto tentang sistem ganti rugi lahan dan problematika yang terjadi akibat sistem ganti rugi lahan pada masyarakat Tampingmojo. Kemudian dianalisis melalui pengamatan untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan dengan menonjolkan hal yang terkait dalam problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi di tempat tersebut karena pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto menggunakan lahan masyarakat Desa Tampingmojo. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen pengumpul data, yakni pengamat partisipan. Sebagai pengamat partisipan, peniliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai pihak yang mengetahui atau terlibat dalam proses pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Penelitian di Desa Tampingmojo bertujuan untuk mengetahui informasi tentang sistem ganti rugi lahan dan problematika yang terjadi akibat sistem ganti rugi pada masyarakat yang lahannya terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini berlangsung pada 8 Desember 2014 sampai 18 Mei 2015, delapan puluh delapan (88) hari. Dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No.	Tanggal	Penelitian
1.	8-12 Desember 2014	Menggali informasi secara singkat kepada Kepala Desa Tampingmojo seputar pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto dan melihat kehidupan masyarakat Tampingmojo.
2.	2-5 Januari 2015	Menggali informasi secara mendalam kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Tampingmojo, BPD Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Seksi Pembangunan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Jombang, dan masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto.
3.	1-31 Maret 2015	Menggali informasi kepada PPK Mojokerto dan P2T Jombang terkait pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Disertai pengolahan data, analisis, dan hasil laporan penelitian.
4.	1-30 April 2015	Menggali informasi secara mendalam kepada beberapa pihak serta silaturahmi ke warga Tampingmojo. Disertai pengolahan data, analisis, dan hasil laporan penelitian.
5.	1-18 Mei 2015	Menggali data-data yang masih dibutuhkan untuk melengkapi proses pengolahan data, analisis, dan hasil laporan penelitian.

Sumber : Diolah sendiri

3. Pemilihan Subyek Penelitian

Pada penelitian ini diambil tiga belas (13) informan untuk memberikan informasi seputar problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto tentang ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol. Beberapa subyek penelitian yang diambil adalah :

Tabel 1.2
Subyek Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	M. Na'im	Kepala Desa Tampingmojo
2.	Sunarwati	Staff Urusan Umum Tampingmojo
3.	Minarno	Kepala Dusun Tampingan
4.	Pi'i Setya Buana	Ketua BPD Tampingmojo/ Warga yang sudah melepaskan lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Hari Subagyo	Sekretaris Camat Tembelang
6.	Setiawan	Seksi Pembangunan Dinas PU dan Pengairan Jombang
7.	Moch. Supakun	Kasubag Pemkab Jombang/ P2T Jombang
8.	Bambang Tri Tjahjono	Kepala PPK Mojokerto
9.	Bambang Eko Suharso	Kepala TU PPK Mojokerto
10.	Karminah	Ibu rumah tangga/ Warga yang belum melepaskan lahan
11.	Sunarwo	Wiraswasta/ Warga yang belum melepaskan lahan
12.	Karti'ah	Ibu rumah tangga/ Warga yang belum melepaskan lahan
13.	Nur Said	Wiraswasta (ahli waris alm. Sarimah)/ Warga yang belum melepaskan lahan

Sumber : Diolah sendiri

Sehingga dapat diperoleh informasi seputar problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto tentang ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol. Dari beberapa informasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah uraian yang menjelaskan tentang sistem ganti rugi lahan dan problematika yang terjadi akibat sistem ganti rugi lahan.

4. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini tahap-tahap penelitian yang digunakan adalah :

a. Tahap pra-penelitian

Sebelum melakukan penelitian tentang "PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-MOJOKERTO (Studi tentang Ganti Rugi Lahan Masyarakat di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)", informasi tentang pembangunan tersebut belum cukup banyak diketahui oleh peneliti. Informasi yang diperoleh hanya seputar pembangunan Jalan Tol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kertosono-Mojokerto menggunakan lahan masyarakat, tanpa mengetahui proses ganti rugi lahan dan pihak yang terkait dengan pembangunan.

Sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian di Desa Tampingmojo untuk menggali informasi seputar pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Hal yang dilakukan adalah mencari informan yang bersedia memberikan informasi seputar pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Dan dari informasi tersebut mampu memberikan gambaran pada peneliti bahwa pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto menggunakan lahan masyarakat Tampingmojo dengan cara memberikan uang ganti rugi bagi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan.

b. Tahap waktu penelitian

Saat penelitian berlangsung dilapangan diperoleh informasi dari beberapa informan tentang problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto tentang ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol. Mengetahui rencana yang dilakukan pemerintah dan juga prosedur yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan ganti rugi lahan untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Selain itu juga memberikan gambaran tentang sesuatu yang diinginkan masyarakat dari proses pemberian ganti rugi lahan tersebut, agar nantinya tidak terjadi salah pengertian dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Observasi

Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung di Desa Tampingmojo. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tempat, kegiatan, serta peristiwa yang terjadi pada masyarakat Desa Tampingmojo. Dalam metode ini, observasi dilakukan secara tidak terstruktur dan berjalan mengalir sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat tanpa ada rekayasa yang dilakukan oleh peneliti.

b. Metode Interview (Wawancara)

Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Informan yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto.

c. Metode Dokumentasi

Dalam metode ini, peneliti juga mencari data yang berasal dari instansi terkait berupa laporan dan foto. Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk melengkapi laporan penelitian. Serta dokumentasi foto dengan beberapa informan yang bersedia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan semua data yang terkumpul di lapangan. Peneliti menggunakan *diskriptif analitis*, yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin menunjukkan dan menggambarkan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan. Sehingga diperoleh kejelasan mengenai sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Kemudian dilakukan analisis dengan menganalisis isi yang terkandung dalam berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan sehingga dapat diperoleh kesimpulan atas jawaban permasalahan yang ada.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian tentang "PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-MOJOKERTO (Studi tentang Ganti Rugi Lahan Masyarakat di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)", dilakukan analisis data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dari beberapa informan. Kemudian dikembangkan untuk memperoleh jawaban dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang dilakukan dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan bahan untuk memberikan penjelasan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Untuk melihat keabsahan data dari penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara triangulasi (informan, metode penggalian, dan teori). Yakni hubungan peneliti dengan informan dalam proses penggalian data dengan cara wawancara kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan. Selain itu juga dilakukan dokumentasi kepada beberapa informan yang akan diwawancarai sebagai bukti melakukan penelitian. Apabila terdapat informan yang tidak berkenan diambil gambarnya untuk dokumentasi saat wawancara maka peneliti tidak akan melakukan paksaan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membahasnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang penelitian yang dilakukan tentang problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Desa Tampingmojo. Setelah menjelaskan latar belakang penelitian di Desa Tampingmojo, peneliti merumuskan beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah yang bertujuan untuk menentukan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Dari tujuan penelitian tersebut dapat diperoleh manfaat dengan adanya penelitian yang dilakukan. Kemudian peneliti mendefinisikan secara konseptual beberapa kata kunci dalam judul penelitian. Setelah itu peneliti menjelaskan penelitian terdahulu dalam telaah pustaka yang bertujuan untuk mengetahui penelitian sebelum penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan penelitian. Pada bagian metode penelitian, peneliti menjelaskan metode yang digunakan saat penelitian. Kemudian menjelaskan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II : DIALEKTIKA KONFLIK-RALF DAHRENDORF

Dalam bab ini, berisi tentang kajian teori yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan konflik dalam perspektif Ralf Dahrendorf yaitu mengenai dua wajah masyarakat dan dialektika konflik kekuasaan. Kedua hal tersebut menjelaskan tentang dua wajah masyarakat yang memiliki kepentingan sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Namun dibalik permasalahan tersebut terdapat beberapa pihak yang ingin memiliki kekuasaan dominan diantara yang lain. Sehingga konflik dalam perspektif Ralf Dahrendorf digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-MOJOKERTO: TINJAUAN RALF DAHRENDORF

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai deskripsi umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data. Yakni deskripsi umum tentang Desa Tampingmojo dan masyarakatnya. Kemudian dilanjutkan pada deskripsi hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan deskripsi umum yang telah diperoleh. Setelah deskripsi umum objek dan deskripsi hasil penelitian diperoleh, kemudian peneliti melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang digunakan. Sehingga pembaca mampu memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir, yang berisi: a) kesimpulan dari hasil paparan penelitian lapangan yang menjawab rumusan masalah dan b) saran-saran dari hasil karya penelitian untuk perbaikan dan kebaikan dari hasil karya penelitian ini. Dari kesimpulan dapat diketahui inti dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang disusun. Kemudian pada bagian saran bertujuan untuk memberikan masukan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga peneliti maupun pembaca dapat membuat laporan penelitian yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id